

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INVESTASI KEPELABUHAN DALAM
PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM MARITIM DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

**Mursidi
2102190131**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INVESTASI KEPELABUHAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM MARITIM DI INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**Mursidi
2102190131**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Mursidi
NIM : 2102190131
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “ **Kebijakan Pengembangan Investasi Kepelabuhanan Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Maritim Di Indonesia**” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 November 2023



Mursidi



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**Kebijakan Pengembangan Investasi Kepelabuhanan
Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Maritim Di Indonesia**

Oleh :

Nama : Mursidi
NIM : 2102190131
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 15 November 2021
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.,
NIDN. 0326106005

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 327096504

Pembimbing II

Dr. Andrew Bethlen, S.H., S.Kom., M.H.
NIDN. 0331038704

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN/NIDK: 0320116402



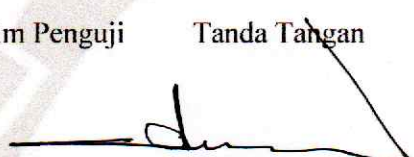

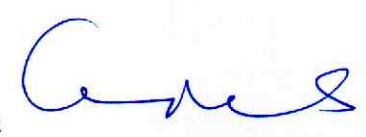
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 15 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mursidi
NIM : 2102190131
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**Kebijakan Pengembangan Investasi Kepelabuhanan Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Maritim Di Indonesia**" oleh tim penguji yang terdiri dari::

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA..	Sebagai Ketua	
2. Dr. Andrew Bethlen, S.H., S.Kom., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Gindo E.L Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursidi
NIM : 2102190131
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **Kebijakan Pengembangan Investasi Kepelabuhanan
Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Maritim Di
Indonesia**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dari sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 15 November 2023



Mursidi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis dengan judul “ Kebijakan Pengembangan Investasi Kapalabuhan Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Maritim DI Indonesia “

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Peneliti menyadari bahwa tesis ini dapat selesai karena bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia juga sebagai Pembimbing 1.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Andrew Betlehn, S.H., M.H., M.TL., selaku Dosen Pembimbing 2.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Kristin Indonesia yang telah memberikan pengajaran dibidang keilmuan kepada penulis selama ini beserta seluruh staff Universitas Kristen Indonesia.
6. Keluarga Tersayang, Orang Tua, istri, putra-putri tercinta, seluruh keluarga besar dan seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa dan selalu mendampingi dalam masa sulit dan Bahagia.
7. Sahabat Saya Dr. H. Muchsin Mansyur S.Pel, S.E, S.H, M.H, M.Mtr, yang telah banyak membantu dan teman diskusi dalam penyelesaian tesis Penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa program studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia atas dukungan dan kebersamaan kita menjalani Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis semenjak awal proses menjalani Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya serta membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Jakarta, 15 November 2023

Hormat kami,

Mursidi



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN . PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1. Maksud Penelitian	10
2. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Teoretis dan Konsep	11
1. Kerangka Teoretis	11
2. Kerangka Konsep	17
E. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN TEORETIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INVESTASI KEPELABUHAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM MARITIM	26
A. Negara Hukum Dalam Kebijakan Kepelabuhan	26
1. Negara Hukum	26
2. Unsur Negara Hukum	31

3.	Konsepsi Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila	36
B.	Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Kebijakan Kepelabuhan	41
1.	Kepastian Hukum	41
2.	Asas Kepastian Hukum	46
3.	Penerapan Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Kepelabuhan	50
C.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengembangan Investasi Kepelabuhan	55
1.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	55
2.	Asas Dalam Peraturan Perundang-undangan	60
3.	Kebijakan Kepelabuhan Dalam Kerangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	63
BAB III	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INVESTASI KEPELABUHANAN DI INDONESIA	68
A.	Perkembangan Kepelabuhan	68
1.	Sejarah Perkembangan Kepelabuhanan	68
2.	Peranan Pelabuhan Dalam Pengembangan Investasi	75
a.	Prasarana Pelabuhan.....	76
b.	Kinerja Operasional Pelayaran Pelabuhan.....	80
c.	Keterpaduan Jaringan Prasarana Antarmoda.....	83
d.	Sumber Daya Manusia.....	85
B.	Tantangan Pengembangan Investasi Pelabuhan	85
C.	Perbandingan Singkat Pengelolaan Investasi Pelabuhan Dengan Negara Lain	90
D.	Pengaturan Kepelabuhanan di Indonesia	97
1.	Arah Kebijakan Pengembangan Investasi Kepelabuhan Dalam Undang-Undang Pelayaran	97

2. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Kepelabuhanan Dalam Pengembangan Investasi Pelabuhan	102
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN HUKUM KEPELABUHANAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM MARITIM DI INDONESIA ...	110
A. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Investasi Kepelabuhanan di Indonesia	110
B. Kebijakan Pembentukan Hukum Kepelabuhanan Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Maritim di Indonesia ...	127
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143

ABSTRAK

Konsep pembangunan hukum kemaritiman Indonesia masa depan membutuhkan undang-undang khusus kepelabuhanan yang terpisah dari UU Pelayaran untuk memberikan kepastian hukum tentang investasi, tenaga kerja, perdagangan, dan kelancaran arus barang dan logistik di pelabuhan. Saat ini, otoritas pelabuhan tertinggi tidak diikuti oleh regulasi setingkat undang-undang. Akibatnya, peran dan fungsi regulator lembaga tersebut terkesan diabaikan. Meskipun pelabuhan merupakan pintu masuk barang atau pusat ekonomi, otoritas pelabuhan tidak memiliki wewenang tertinggi untuk mengatur arus barang di pelabuhan, tetapi BUP adalah operator pelabuhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan yuridis normatif menggunakan analisis data kualitatif, yang berarti data dikumpulkan, dikelompokkan, dan dihubungkan satu sama lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengembangan investasi kepelabuhanan harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil berada dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan. Dengan kata lain, prinsip kepastian hukum kebijakan pengembangan investasi kepelabuhanan dapat berarti bahwa peraturan dan peraturan yang berlaku harus jelas dan konsisten agar para investor dapat memahami tata cara dan prosedur yang harus diikuti. Karena pelabuhan merupakan salah satu sektor strategis ekonomi Indonesia yang memainkan peran penting dalam pengangkutan dan distribusi barang serta jasa, maka perlu dibuat UU Kepelabuhanan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan kegiatan di pelabuhan dari sudut pandang pembangunan hukum maritim. Pelabuhan juga memainkan peran penting dalam pertahanan negara dan keamanan nasional. Akibatnya, pelabuhan dapat dikelola dengan baik dan menguntungkan masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Kata Kunci : Kebijakan Pengembangan Investasi, Pelabuhan, Hukum Maritim.

ABSTRACT

The concept of developing Indonesian maritime law in the future requires special port laws that are separate from the Shipping Law to provide legal certainty regarding investment, labor, trade, and the smooth flow of goods and logistics at ports. Currently, the highest port authority is not followed by regulations at the level of law. As a result, the role and function of the institutional regulator seem to be neglected. Even though the port is an entry point for goods or an economic center, the port authority does not have the highest authority to regulate the flow of goods at the port, but BUP is the port operator.

This research uses a normative juridical approach, where the process is to find legal rules, principles, and doctrines to resolve legal problems. The normative juridical approach uses qualitative data analysis, which means data are collected, grouped, and linked to each other.

The results of this research indicate that the implementation of port investment development policies must be based on the principles of the rule of law to ensure that decisions and actions taken are within a clear and transparent legal framework. In other words, the principle of legal certainty in port investment development policies can mean that the applicable rules and regulations must be clear and consistent so that investors can understand the procedures that must be followed. Because ports are one of the strategic sectors of the Indonesian economy that play an important role in the transportation and distribution of goods and services, it is necessary to create a port law to strengthen the regulation and supervision of activities at ports from a maritime law development perspective. Ports also play an important role in national defense and national security. As a result, ports can be managed well and benefit society and the Indonesian economy as a whole.

Keywords: *Investment Development Policy, Ports, Maritime Law.*